



**RISK MANAGEMENT
TAHUN 2023**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
KOTA SINGKAWANG
2023**



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Pelita No. 1 Pasiran, Singkawang Barat, Singkawang Kalimantan Barat 79123
Telepon: (0562) 635727, Faksimile (0562) 635727
Laman bappeda.singkawangkota.go.id, Pos-el bappedakotaskw@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 900.1.11/25/BAPPEDA.SET.B TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMILIK RISIKO
BADAN PERENCANAAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 188.45/194/ITDA.SET-B Tahun 2020 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kota Singkawang, maka perlu membentuk Unit Pemilik Risiko Bappeda Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko Bappeda Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pelita No. 1 Pasiran, Singkawang Barat, Singkawang Kalimantan Barat 79123

Telepon: (0562) 635727, Faksimile (0562) 635727

Laman bappeda.singkawangkota.go.id, Pos-el bappedakotaskw@gmail.com

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Pelita No. 1 Pasiran, Singkawang Barat, Singkawang Kalimantan Barat 79123
Telepon: (0562) 635727, Faksimile (0562) 635727
Laman bappeda.singkawangkota.go.id, Pos-el bappedakotaskw@gmail.com

- (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
8. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 32);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Unit Pemilik Risiko Bappeda Kota Singkawang, terbagi atas :
1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II; dan
 2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.
- KEDUA** : Membentuk Unit Pemilik Risiko Bappeda dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah ini.
- KETIGA** : Unit Pemilik Risiko Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Pelita No. 1 Pasiran, Singkawang Barat, Singkawang Kalimantan Barat 79123
Telepon: (0562) 635727, Faksimile (0562) 635727
Laman bappeda.singkawangkota.go.id, Pos-el bappedakotaskw@gmail.com

1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II, memiliki tugas :
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Bappeda Kota Singkawang;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Bappeda Kota Singkawang;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kota Singkawang;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

2. Unit Pemilik risiko Tingkat Eselon III dan IV, memiliki tugas :
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut :

1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/ atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di Unit kerjanya;
2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pelita No. 1 Pasiran, Singkawang Barat, Singkawang Kalimantan Barat 79123

Telepon: (0562) 635727, Faksimile (0562) 635727

Laman bappeda.singkawangkota.go.id, Pos-el bappedakotaskw@gmail.com

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
DAERAH DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR
900.1.11/25/BAPPEDA.SET.B TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMILIK RISIKO
BAPPEDA KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 26 September 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON II
BAPPEDA KOTA SINGKAWANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
1.	Kepala Badan Perencanaan Daerah Daerah Kota Singkawang	Ketua
2.	Sekretaris Bappeda Kota Singkawang	Koordinator
3.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota
4.	Kabid Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Anggota
5.	Kabid Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota



KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH,

DWI PUTRA SUMARNA, S.T.,M.T.

Pembina Utama Muda

MIP 197001051997031006



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pelita No. 1 Pasiran, Singkawang Barat, Singkawang Kalimantan Barat 79123
Telepon: (0562) 635727, Faksimile (0562) 635727
Laman bappeda.singkawangkota.go.id, Pos-el bappedakotaskw@gmail.com

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR
900.1.11/25/BAPPEDA.SET.B TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMILIK RISIKO
BAPPEDA KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 26 September 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON III DAN IV
BAPPEDA KOTA SINGKAWANG**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
I.	SEKRETARIAT	
1.	Sekretaris Bappeda Kota Singkawang	Ketua
2.	Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)	Koordinator
3.	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Anggota
4.	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	Anggota
II.	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
1.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Ketua
2.	Perencana Ahli Muda Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota
III.	BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR	
1.	Kabid Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Ketua
2.	Perencana Ahli Muda Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Anggota
IV.	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
1.	Kabid Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH,


DWI PUTRA SUMARNA, S.T.,M.T.

Pembina Utama Muda

NIP 197001051997031006





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pelita No. 1 Pasiran, Singkawang Barat, Singkawang Kalimantan Barat 79123

Telepon: (0562) 635727, Faksimile (0562) 635727

Laman bappeda.singkawangkota.go.id, Pos-el bappedakotaskw@gmail.com

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
DAERAH DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR
900.1.11/25/BAPPEDA.SET.B TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMILIK RISIKO
BAPPEDA KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 26 September 2023

URAIAN TUGAS UNIT PEMILIK RISIKO BAPPEDA
KOTA SINGKAWANG

A. Uraian Tugas Ketua :

1. menetapkan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan risiko
2. menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
3. menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP); dan
4. menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko.

B. Uraian Tugas Koordinator :

1. menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko;
2. menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
3. mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan; dan
4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah.



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Pelita No. 1 Pasiran, Singkawang Barat, Singkawang Kalimantan Barat 79123
Telepon: (0562) 635727, Faksimile (0562) 635727
Laman bappeda.singkawangkota.go.id, Pos-el bappedakotaskw@gmail.com

C. Uraian Tugas Anggota :

1. membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko;
2. membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko, antara lain : Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan
3. melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko yang meliputi: sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko.

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH,

DWI PUTRA SUMARNA, S.T.,M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 197001051997031006

Matriks Analisis Risiko		Dampak/Konsekuensi				
		Tidak signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat signifikan
		1	2	3	4	5
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	5				
	Kemungkinan besar	4	4			
	Kemungkinan kecil	3		6		
	jarang	2			6	
	Sangat jarang	1				4
Keterangan :			Rendah	Risiko dapat diterima		
			Sedang dan Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Selanjutnya		
			Sangat Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Prioritas		

Kriteria Risiko

Kriteria Kemungkinan	
Nilai Kemungkinan	Keterangan
1	Sangat Jarang
2	Jarang
3	Kadang-Kadang
4	Sering
5	Sangat Sering

Kriteria Dampak	
Nilai Dampak	Keterangan
1	Tidak Signifikan
2	Kurang Signifikan
3	Sedang
4	Signifikan
5	Sangat Signifikan

KRITERIA KEMUNGKINAN

Probabilitas		Kriteria
Rating	%	
1	0-10	Sangat tidak mungkin/hampir mustahil
2	11-30	Kecil kemungkinan, tapi tdk mustahil
3	31-50	Kemungkinan terjadi
4	51-90	Sering terjadi
5	> 90	Hampir pasti terjadi

KRITERIA DAMPAK

Level	Deskriptor	Deskripsi
5	Sangat tinggi/ katastropik	Mengancam program dan organisasi serta stakeholders. Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
4	Besar	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
3	Menengah/ medium	Mengganggu administrasi program. Kerugian keuangan dan politis cukup besar
2	Kecil	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders
1	Sangat rendah/ tidak signifikan	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders

**FORMULIR
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Singkawang		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang Dinilai	: 2023-2026		
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	: Urusan Penunjang : BAPPEDA		
Sumber Data	Renstra BAPPEDA		
Tujuan Strategis	Meningkatnya daya Saing daerah Melalui Penerapan Inovasi Daerah		
Indikator Tujuan	Indeks Inovasi daerah		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Jumlah Inovasi Daerah		
IKU Renstra OPD	No	IKU	2023
	1	Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	100%
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan : Meningkatnya daya Saing daerah Melalui Penerapan Inovasi Daerah Sasaran : Meningkatnya Jumlah Inovasi Daerah IKU : Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah		
	Singkawang, 26 September 2023 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  DWI PUTRA SUMARNA, S.T.,M.T. NIP 197001051997031006		

**FORMULIR
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Singkawang		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang Dinilai	: 2023-2026		
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	: Urusan Penunjang : BAPPEDA		
Sumber Data	Renstra BAPPEDA		
Tujuan Strategis	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
Indikator Tujuan	Nilai SAKIP		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah		
IKU Renstra OPD	No	IKU	2023
	1	Persentase Nilai Sakip Komponen Perencanaan	100%
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah IKU : persentase Nilai Sakip Komponen Perencanaan		
	Singkawang, 26 September 2023 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  DWI PUTRA SUMARNA, S.T.,M.T. NIP 197001051997031006		

FORMULIR
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Singkawang
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang Dinilai	: 2023
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penunjang
OPD yang Dinilai	: BAPPEDA
Sumber Data	Renja Bappeda Tahun 2023
Tujuan Strategis	Meningkatnya daya Saing daerah Melalui Penerapan Inovasi Daerah
	5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.2.01 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
	5.05.02.2.01.02 Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
	5.05.02.2.01.12 Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
	5.05.02.2.01.14 Sub Kegiatan Fasilitas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data pengkajian peraturan
	5.05.02.2.01.15 Sub Kegiatan Fasilitas pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang
	5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
	5.05.02.2.02.01 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
	5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan Pembangunan
	5.05.02.2.03.07 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup
	5.05.02.2.03.09 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan umum
	5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
	5.05.02.2.04.01 Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
	5.05.02.2.02.02 Sub Kegiatan Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi
	5.05.02.2.02.03 Sub Kegiatan Diseminasi jenis, Prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif
	5.05.02.2.02.04 Sub Kegiatan Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan
	5.05.02.2.02.05 Sub Kegiatan Fasilitas hak kekayaan intelektual
	5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	5.01.02.2.01.01 Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.02 Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
	5.01.01.2.01.03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik
	5.01.02.2.01.04 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
	5.01.02.2.01.05 Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
	5.01.02.2.01.06 Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
	5.01.02.2.01.07 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	5.01.02.2.02 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.02.01 Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.02.02 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Program
BAPPEDA (Renja
2023)
dan Kegiatan
Utama


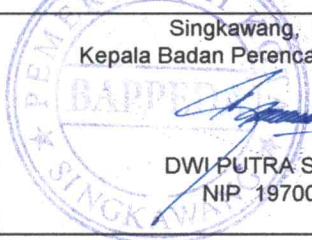
5.01.02.2.02.03 Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
5.01.02.2.03.01 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03.01 Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
5.01.02.2.03.02 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
5.01.02.2.03.03 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.04 Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dibidang
5.01.02.2.04.01 Sub Kegiatan Pengelolaan data dalam system informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah
5.01.02.2.04.02 Sub Kegiatan Penerapan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah
5.01.02.2.04.03 Sub Kegiatan Pembinaan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah pemerintah Kabupaten/Kota
5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.01 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.01.02 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
5.01.03.2.01.03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah
5.01.03.2.01.04 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.01.05 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.06 Sub Kegiatan Asisten penyusun dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia
5.01.03.2.01.07 Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perancangan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia
5.01.03.2.01.08 Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonis perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia
5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
5.01.03.2.02.01 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.02.02 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
5.01.03.2.02.03 Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian
5.01.03.2.02.04 Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian
5.01.03.2.02.05 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.02.06 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
5.01.03.2.02.07 Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA

	5.01.03.2.02.08 Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		
	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
	5.01.02.2.03.01 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
	5.01.02.2.03.02 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur		
	5.01.02.2.03.03 Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur		
	5.01.02.2.03.04 Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		
	5.01.02.2.03.05 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
	5.01.02.2.03.06 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
	5.01.02.2.03.07 Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusun dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan		
	5.01.02.2.03.08 Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan		
	No	Indikator Keluaran	Target
Keluaran/Hasil Kegiatan	5.05.02.2.01	Cakupan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	4 Laporan
	5.05.02.2.02	Cakupan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen
	5.05.02.2.03	Cakupan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0 Dokumen
	5.05.02.2.04	Cakupan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen 4 Laporan
	5.01.02.2.01	Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5 Dokumen 3 BA 234 Usulan
	5.01.02.2.02	Cakupan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Masukan 120 Orang 1 Buku
	5.01.02.2.03	Cakupan OPD yang dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporannya sesuai dengan Dokumen Perencanaan	8 Laporan 5 Kerjasama
	5.01.02.2.04	Cakupan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah	3 Dokumen
	5.01.03.2.01	Cakupan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5 Dokumen 2 Laporan 28 OPD
	5.01.03.2.02	Cakupan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)	4 Dokumen 2 Laporan 10 OPD
	5.01.03.2.03	Cakupan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Dokumen 2 Laporan 20 OPD
	Informasi Lain		
	Sub Kegiatan :		
	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		
	Jumlah data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola dengan baik		
	Jumlah laporan hasil Fasilitas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data pengkajian peraturan		
	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitas pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang		
	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan aspek-aspek sosial		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengerjaan umum		

Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko

Jumlah Dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi
Jumlah laporan hasil pelaksanaan Diseminasi jenis, Prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif
Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan
Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitas hak kekayaan intelektual
Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan
Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah-Daerah
Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik
Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah
Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)
Jumlah Masukan Hasil Analisis Data untuk Penyusun Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)
Jumlah Orang yang Dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi
Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Ditertibkan
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah Kerjasama Daerah yang DiKoordinasikan Pelaksanaannya
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Jumlah data dalam sistem informasi pemerintahan daerah dibidang pembangunan daerah yang dikelola
Jumlah dokumen hasil Penerapan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah
Jumlah dokumen hasil Pembinaan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah pemerintah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)
Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah
Jumlah Laporan Hasil Sinkronasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Pemerintah
Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunnya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pembangunan manusia
Jumlah laporan hasil sinkronasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunnya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)
Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang
Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian
Jumlah laporan hasil sinkronasi Restra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Assistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang SDA
Jumlah laporan hasil sinkronasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang
Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang infrastruktur
Jumlah laporan hasil sinkronasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang
Jumlah laporan hasil Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusun dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan
Jumlah laporan hasil sinkronasi Restra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan
Indikator Kegiatan :
Cakupan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian

Cakupan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Cakupan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Cakupan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Cakupan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Cakupan OPD yang dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporannya sesuai dengan Dokumen Perencanaan
Cakupan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah
Cakupan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Cakupan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)
Cakupan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

	<p>Singkawang, 26 September 2023 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p>  <p>DWI PUTRA SUMARNA, S.T.,M.T. NIP. 197001051997031006</p> 
--	--

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Form 3b

Nama Pemda : Pemerintah Kota Singkawang
 Nama OPD : BAPPEDA Kota Singkawang
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang Dinilai : 2023 - 2026
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 Urusan Pemerintahan : Penunjang
 OPD yang Dinilai : BAPPEDA

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
I	Tujuan Strategis: Meningkatnya daya Saing daerah Melalui Penerapan Inovasi Daerah									
1.	Sasaran Strategis: Meningkatnya Jumlah Inovasi Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	1) Sumber Data Tidak Valid; 2) Data dan informasi belum tersedia secara lengkap; 3) Tim Penyusun tidak kompeten	RSO 23.36.01.2 8	Bappeda	1) Data kelitbang bidang inovasi dan teknologi diperoleh dari perangkat daerah dan pihak-pihak terkait; 2) Kajian berorientasi pada bidang rekayasa industri, sehingga menjadi tantangan untuk mendapatkan tim penyusun yang berkompoten	Eksternal	C	Kajian kelitbang bidang inovasi dan teknologi yang disusun tidak sepenuhnya komprehensif dan akurat, sehingga berpengaruh dalam pengambilan kebijakan di masa mendatang	Kepala Daerah OPD Terkait
			Tidak memiliki komitmen dalam melaksanakan perencanaan	RSO 23.36.01.2 8	Bappeda	Masih belum selarasnya program RKPd terhadap RPJMD, antara Renstra terhadap RPJMD, antara Renja terhadap RKPd serta masih adanya indikator kinerja dala RPJMD, Renstra dan RKPd yang belum tercapai.	Eksternal	C	Kesulitan dalam mengambil kebijakan untuk menentukan skala prioritas program/kegiatan untuk capaian sasaran pada visi misi kepala daerah	Kepala Daerah OPD Terkait
2.	Tujuan Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Data yang disampaikan tidak sesuai format/kertas kerja dan tidak tepat waktu	RSO 23.36.01.2 8	Bappeda	Data yang disampaikan tidak mempedomani acuan perundang-undangan serta tidak memperhatikan batasan waktu pengumpulan data	Eksternal	C	Proses asistensi dan verifikasi data menjadi terhambat	Kepala Daerah OPD Terkait
	Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Nilai Sakip Komponen Perencanaan	Data tidak akurat	RSO 23.36.01.2 8	Bappeda	Data yang disajikan dalam dokumen perencanaan tidak up to date	Eksternal	C	Data dalam dokumen perencanaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Kepala Daerah OPD Terkait
			Terjadinya Keterlambatan dalam Proses Verifikasi serta Validasi Dokumen Renja dan Renstra	RSO 23.36.01.2 8	Bappeda	1) Dokumen Perencanaan Tingkat Kota masih berproses sehingga belum dapat dijadikan acuan terutama terkait pagu indikatif	Eksternal	C	Singkatnya waktu untuk proses asistensi	Kepala Daerah OPD Terkait
			Belum selarasnya indikator dari tujuan strategis hingga indikator sub kegiatan	RSO 23.36.01.2 8	Bappeda	1) Rendahnya pemahaman terhadap leveling dan kaidah Smart dalam penyusunan indikator 2) Dokumen Perencanaan belum dibahas secara lebih intensif di tingkat OPD.	Eksternal	C	Sulit mendapatkan target yang akurat	Kepala Daerah OPD Terkait

			Data yang disampaikan tidak sesuai format/kertas kerja dan tidak tepat waktu	RSO 23.36.01.2 8	Bappeda	Data yang disampaikan tidak mempedomani acuan perundang-undangan serta tidak memperhatikan batasan waktu pengumpulan data	Eksternal	C	Proses asistensi dan verifikasi data menjadi terhambat	Kepala Daerah OPD Terkait
			Data yang disampaikan oleh OPD tidak sesuai format pengisian/kertas kerja serta penyampaian tidak tepat waktu	RSO 23.36.01.2 8	Bappeda	Data yang disampaikan tidak mempedomani acuan perundang-undangan serta tidak memperhatikan batasan waktu pengumpulan	Eksternal	C	Proses asistensi dan verifikasi data menjadi terhambat	Kepala Daerah OPD Terkait
			Tidak sinkronnya data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perangkat daerah rumpu kewilayahan	RSO 23.36.01.2 8	Bappeda	Munculnya kebijakan nasional dan provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Eksternal	C	Target kinerja dan anggaran melebihi target pagu yang ditetapkan dalam dokumen pembangunan daerah	Kepala Daerah OPD Terkait

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Form 3c

Nama Pemda : Kota Singkawang
 Nama OPD : BAPPEDA
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah
 Urusan Pemerintahan : Penunjang
 OPD yang Dinilai : BAPPEDA

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Program Penelitian dan Pengembangan daerah	Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah									
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi										
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Pelaksanaan	1) Sumber Data Tidak Valid; 2) Data dan informasi belum tersedia secara lengkap; 3) Tim Penyusun tidak kompeten	RSO 23.36.01.28	Bappeda	1) Data kelitbang bidang inovasi dan teknologi diperoleh dari perangkat daerah dan pihak-pihak terkait; 2) Kajian berorientasi pada bidang rekayasa industri, sehingga menjadi tantangan untuk mendapatkan tim penyusun yang berkompoten	External	c	Kajian kelitbang bidang inovasi dan teknologi yang disusun tidak sepenuhnya komprehensif dan akurat, sehingga berpengaruh dalam pengembalian kebijakan di masa mendatang	Kepala Daerah OPD Terkait
			Pelaksanaan	Tidak memiliki komitmen dalam melaksanakan perencanaan	RSO 23.36.01.28	Bappeda	Masih belum selarasnya program RKPd terhadap RPJMD, antara Renstra terhadap RPJMD, antara Renja terhadap RKPd serta masih adanya indikator kinerja dala RPJMD, Renstra dan RKPd yang belum tercapai.	External Internal	c	Kesulitan dalam mengambil kebijakan untuk menentukan skala prioritas program/kegiatan untuk capaian sasaran pada visi misi kepala daerah	Kepala Daerah OPD Terkait
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen Evaluasi Perangkat daerah yang sesuai dengan RPJMD dan RKPd									
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah										
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Perencanaan	Tidak memiliki komitmen dalam melaksanakan perencanaan	RSO 23.36.01.28	Bappeda	Masih belum selarasnya program RKPd terhadap RPJMD, antara Renstra terhadap RPJMD, antara Renja terhadap RKPd serta masih adanya indikator kinerja dala RPJMD, Renstra dan RKPd yang belum tercapai.		c	Kesulitan dalam mengambil kebijakan untuk menentukan skala prioritas program/kegiatan untuk capaian sasaran pada visi misi kepala daerah	
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan RPJMD/RKPd Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan RPJMD/RKPd Persentase Dokumen Perencanaan Bidang infrastruktur yang Sesuai dengan RPJMD/RKPd									

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia											
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Pelaksanaan	Data yang disampaikan oleh OPD tidak sesuai format pengisian/kertas kerja serta penyampaian tidak tepat waktu	RSO 23.36.01.28	Bappeda	Data yang disampaikan tidak mempedomani acuan perundang-undangan serta tidak memperhatikan batasan waktu pengumpulan	Eksternal	c	Proses asistensi dan verifikasi data menjadi terhambat	Kepala OPD Terkait	Daerah
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Pelaksanaan	Data yang disampaikan oleh OPD tidak sesuai format pengisian/kertas kerja serta penyampaian tidak tepat waktu	RSO 23.36.01.28	Bappeda	Data yang disampaikan tidak mempedomani acuan perundang-undangan serta tidak memperhatikan batasan waktu pengumpulan data	Eksternal	c	Proses asistensi dan verifikasi data menjadi terhambat	Kepala OPD Terkait	Daerah
		Pelaksanaan	Terjadinya Keterlambatan dalam Proses Verifikasi serta Validasi Dokumen Renja dan Renstra	RSO 23.36.01.28	Bappeda	1) Dokumen Perencanaan Tingkat Kota masih berproses sehingga belum dapat dijadikan acuan terutama terkait pagu indikatif	Eksternal	c	Singkatnya waktu untuk proses asistensi	Kepala OPD Terkait	Daerah
		Pelaksanaan	Belum selarasnya indikator dari tujuan strategis hingga indikator sub kegiatan	RSO 23.36.01.28	Bappeda	1) Rendahnya pemahaman terhadap leveling dan kaidah Smart dalam penyusunan indikator 2) Dokumen Perencanaan belum dibahas secara lebih intensif di tingkat OPD.	Eksternal	c	Sulit mendapatkan target yang akurat	Kepala OPD Terkait	Daerah
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)											
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Pelaksanaan	Data tidak akurat	RSO 23.36.01.28	Bappeda	Data yang disajikan dalam dokumen perencanaan tidak up to date	Eksternal	c	Data dalam dokumen perencanaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Kepala OPD Terkait	Daerah
		Pelaksanaan	Data yang disampaikan tidak sesuai format/kertas kerja dan tidak tepat waktu	RSO 23.36.01.28	Bappeda	Data yang disampaikan tidak mempedomani acuan perundang-undangan serta tidak memperhatikan batasan waktu pengumpulan data	Eksternal	c	Proses asistensi dan verifikasi data menjadi terhambat	Kepala OPD Terkait	Daerah
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan											
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan		Pelaksanaan	Tidak sinkronnya data target Ikinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perangkat daerah rumpu kewilayahan	RSO 23.36.01.28	Bappeda	Munculnya kebijakan nasional dan provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Eksternal	c	Target kinerja dan anggaran melebihi target pagu yang ditetapkan dalam dokumen pembangunan daerah	Kepala OPD Terkait	Daerah

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda		: Kota Singkawang			
Tahun Penilaian		: 2023			
Tujuan Strategis OPD		: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
Urusan Pemerintahan		: Penunjang			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis OPD 1:				
1	1) Sumber Data Tidak Valid; 2) Data dan informasi belum tersedia secara lengkap; 3) Tim Penyusun tidak kompeten	RSO 23.36.01.28	2	2	4
2	Tidak memiliki komitmen dalam melaksanakan perencanaan	RSO 23.36.01.28	2	2	4
3	Data yang disampaikan oleh OPD tidak sesuai format pengisian/kertas kerja serta penyampaian tidak tepat waktu	RSO 23.36.01.28	2	2	4
4	Data tidak akurat	RSO 23.36.01.28	2	2	4
5	Terjadinya Keterlambatan dalam Proses Verifikasi serta Validasi Dokumen Renja dan Renstra	RSO 23.36.01.28	2	2	4
6	Belum selarasnya indikator dari tujuan strategis hingga indikator sub kegiatan	RSO 23.36.01.28	2	2	4
7	Data yang disampaikan tidak sesuai format/kertas kerja dan tidak tepat waktu	RSO 23.36.01.28	2	2	4
8	Data yang disampaikan oleh OPD tidak sesuai format pengisian/kertas kerja serta penyampaian tidak tepat waktu	RSO 23.36.01.28	2	2	4
9	Tidak sinkronnya data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perangkat daerah rumpun kewilayahan	RSO 23.36.01.28	2	2	4
II	Risiko Operasional OPD 1:				
1	Tidak sinkronnya data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perangkat daerah rumpun pemerintahan	ROO 23.36.01.28	2	2	4
2	Tidak sinkronnya data kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perangkat daerah rumpun pembangunan manusia	ROO 23.36.01.28	2	2	4
3	Tidak sinkronnya data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perangkat daerah rumpun infrastruktur	ROO 23.36.01.28	2	2	4
4	Tidak sinkronnya data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perangkat daerah rumpun kewilayahan	ROO 23.36.01.28	2	2	4

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Form 5

Nama Pemda : Pemerintah Kota Singkawang
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 Urusan Pemerintahan : Penunjang

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1	Tidak sinkron data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perencanaan perangkat daerah bidang perekonomian	RSO 23.36.01.28	4	Bappeda	Adanya kebijakan nasional, provinsi, adanya keadaan darurat, luar biasa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi	Target kinerja dan anggaran melebihi target pagu yang ditetapkan dokumen pembangunan daerah
2	Data tidak akurat	RSO 23.36.01.28	4	Bappeda	Data yang disajikan dalam dokumen perencanaan tidak up to date	Data dalam dokumen perencanaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya
3	Data yang disampaikan tidak sesuai format/kertas kerja dan tidak tepat waktu	RSO 23.36.01.28	4	Bappeda	Data yang disampaikan tidak mempedomani acuan perundang-undangan serta tidak memperhatikan batasan waktu pengumpulan data	Proses asistensi dan verifikasi data menjadi terhambat
4	Tidak sinkron data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perencanaan perangkat daerah bidang sumber daya manusia	RSO 23.36.01.28	4	Bappeda	Adanya kebijakan nasional, provinsi, adanya keadaan darurat, luar biasa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi	Target kinerja dan anggaran melebihi target pagu yang ditetapkan dokumen pembangunan daerah
5	Data tidak akurat	RSO 23.36.01.28	4	Bappeda	Data yang disajikan dalam dokumen perencanaan tidak up to date	Data dalam dokumen perencanaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya
6	Data yang disampaikan tidak sesuai format/kertas kerja dan tidak tepat waktu	RSO 23.36.01.28	4	Bappeda	Data yang disampaikan tidak mempedomani acuan perundang-undangan serta tidak memperhatikan batasan waktu pengumpulan data	Proses asistensi dan verifikasi data menjadi terhambat
7	Tidak sinkronnya data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perangkat daerah rumpun pemerintahan	RSO 23.36.01.28	4	Bappeda	Munculnya kebijakan nasional dan provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Target kinerja dan anggaran melebihi target pagu yang ditetapkan dokumen pembangunan daerah

8	Terjadinya Keterlambatan dalam Proses Verifikasi serta Validasi Dokumen Renja dan Renstra	RSO 23.36.01.28	4	Bappeda	1) Dokumen Perencanaan Tingkat Kota masih berproses sehingga belum dapat dijadikan acuan terutama terkait pagu indikatif	Singkatnya waktu untuk proses asistensi
9	Belum selarasnya indikator dari tujuan strategis hingga indikator sub kegiatan	RSO 23.36.01.28	4	Bappeda	1) Rendahnya pemahaman terhadap leveling dan kaidah Smart dalam penyusunan indikator 2) Dokumen Perencanaan belum dibahas secara lebih intensif di tingkat OPD.	Sulit mendapatkan target yang akurat
II Risiko Operasional						
1	Tidak sinkronnya data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perangkat daerah rumpun pemerintahan	ROO 23.36.01.28	4	Bappeda		
2	Tidak sinkronnya data kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perangkat daerah rumpun pembangunan manusia	ROO 23.36.01.28	4	Bappeda		
3	Tidak sinkronnya data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perangkat daerah rumpun infrastruktur	ROO 23.36.01.28	4	Bappeda		
4	Tidak sinkronnya data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perangkat daerah rumpun kewilayahan	ROO 23.36.01.28	4	Bappeda		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Form 7

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Singkawang					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					
Urusan Pemerintahan		: Penunjang					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
	Data yang disampaikan tidak sesuai format/kertas kerja dan tidak tepat waktu	RSO 23.36.01.2 8	Permendagri 86 Tahun 2017	Data yang disampaikan Tidak sesuai dengan Pedoman	Dilakukan Verifikasi Data dan Koordinasi Penyempurnaan Data	Bappeda	Triwulan I dan II
	Data yang disampaikan tidak sesuai format/kertas kerja dan tidak tepat waktu	RSO 23.36.01.2 8	Permendagri 86 Tahun 2017	Data yang disampaikan Tidak sesuai dengan Pedoman	Dilakukan Verifikasi Data dan Koordinasi Penyempurnaan Data	Bappeda	Triwulan I dan II
	Data yang disampaikan oleh OPD tidak sesuai format pengisian/kertas kerja serta penyampaian tidak tepat waktu	RSO 23.36.01.2 8	Permendagri 86 Tahun 2017	Data yang disampaikan Tidak sesuai dengan Pedoman	Dilakukan Verifikasi Data dan Koordinasi Penyempurnaan Data	Bappeda	Triwulan I dan II
	Data yang disampaikan oleh OPD tidak sesuai format pengisian/kertas kerja serta penyampaian tidak tepat waktu	RSO 23.36.01.2 8	Permendagri 86 Tahun 2017	Data yang disampaikan Tidak sesuai dengan Pedoman	Dilakukan Verifikasi Data dan Koordinasi Penyempurnaan Data	Bappeda	Triwulan I dan II
	Data yang disampaikan oleh OPD tidak sesuai format pengisian/kertas kerja serta penyampaian tidak tepat waktu	RSO 23.36.01.2 8	Permendagri 86 Tahun 2017	Data yang disampaikan Tidak sesuai dengan Pedoman	Dilakukan Verifikasi Data dan Koordinasi Penyempurnaan Data	Bappeda	Triwulan I dan II
	Data yang disampaikan oleh OPD tidak sesuai format pengisian/kertas kerja serta penyampaian tidak tepat waktu	RSO 23.36.01.2 8	Permendagri 86 Tahun 2017	Data yang disampaikan Tidak sesuai dengan Pedoman	Dilakukan Verifikasi Data dan Koordinasi Penyempurnaan Data	Bappeda	Triwulan I dan II
	Data yang disampaikan oleh OPD tidak sesuai format pengisian/kertas kerja serta penyampaian tidak tepat waktu	RSO 23.36.01.2 8	Permendagri 86 Tahun 2017	Data yang disampaikan Tidak sesuai dengan Pedoman	Dilakukan Verifikasi Data dan Koordinasi Penyempurnaan Data	Bappeda	Triwulan I dan II
	1) Sumber Data Tidak Valid; 2) Data dan informasi belum tersedia secara lengkap; 3) Tim Penyusun tidak kompeten	RSO 23.36.01.2 8	Permendagri 86 Tahun 2018	Data yang disampaikan Tidak sesuai dengan Pedoman	Dilakukan Verifikasi Data dan Koordinasi Penyempurnaan Data	Bappeda	Triwulan I dan II
	Tidak memiliki komitmen dalam melaksanakan perencanaan	RSO 23.36.01.2 8	Permendagri 86 Tahun 2019	Data yang disampaikan Tidak sesuai dengan Pedoman	Dilakukan Verifikasi Data dan Koordinasi Penyempurnaan Data	Bappeda	Tahun n
	Belum optimalnya koordinasi antar OPD Provinsi dan Kab/Kota	RSO 23.36.01.2 8	Permendagri 86 Tahun 2020	Data yang disampaikan Tidak sesuai dengan Pedoman	Dilakukan Verifikasi Data dan Koordinasi Penyempurnaan Data	Bappeda	Tahun n
	Kegiatan yang diusulkan tidak dibutuhkan/ tidak sesuai dengan Renja OPD/ Renstra OPD	RSO 23.36.01.2 8	Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050 Tahun 2020	Data yang disampaikan Tidak sesuai dengan Pedoman	Dilakukan Verifikasi Data dan Koordinasi Penyempurnaan Data	Bappeda	Tahun n
	Keterlambatan penyusunan data	RSO 23.36.01.2 8	Permendagri 86 Tahun 2017	Data yang disampaikan Tidak sesuai dengan Pedoman	Dilakukan Verifikasi Data dan Koordinasi Penyempurnaan Data	Bappeda	Triwulan III dan IV

Belum sempurnanya penyusunan dan penetapan program dan kegiatan	RSO 23.36.01.2 8	Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050 Tahun 2020	Data yang disampaikan Tidak sesuai dengan Pedoman	Dilakukan Verifikasi Data dan Koordinasi Penyempurnaan Data	Bappeda	Triwulan I dan II
Ketidaktepatan pemadu serasian usulan SKPD, hasil musrenbang kecamatan, aspirasi DPRD	RSO 23.36.01.2 8	Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050 Tahun 2020	Data yang disampaikan Tidak sesuai dengan Pedoman	Dilakukan Verifikasi Data dan Koordinasi Penyempurnaan Data	Bappeda	Triwulan I
Keterlambatan pengumpulan data penyusunan badan koordinasi	RSO 23.36.01.2 8	Permendagri 86 Tahun 2017	Data yang disampaikan Tidak sesuai dengan Pedoman	Dilakukan Verifikasi Data dan Koordinasi Penyempurnaan Data	Bappeda	Tahun n
Keterlambatan penyusunan data	RSO 23.36.01.2 8	Permendagri 86 Tahun 2017	Data yang disampaikan Tidak sesuai dengan Pedoman	Dilakukan Verifikasi Data dan Koordinasi Penyempurnaan Data	Bappeda	Triwulan III dan IV
Sumber data tidak valid	RSO 23.36.01.2 8	Melakukan validasi data dengan sektor terkait	Tidak tersedianya data pd sektor terkait	Melakukan pengumpulan data primer	Bappeda	Perpanjangan waktu 3 bulan dari target yang di tetapkan
Tidak sinkron data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perencanaan perangkat daerah bidang	RSO 23.36.01.2 8	Melakukan sinkronisasi data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perencanaan perangkat daerah bidang	Tidak tersedianya data pd sektor terkait	Melakukan pengumpulan data primer	Bappeda	Perpanjangan waktu 3 bulan dari target yang di tetapkan
Data yang disampaikan tidak sesuai format pengisian/kertas kerja serta penyampian tidak tepat waktu	RSO 23.36.01.2 8	Melakukan sosialisasi penggunaan format yang sesuai dan batas waktu yang ditetapkan	Tidak tersedianya data tepat waktu	Evaluasi penjadwalan data yang tersedia agar tepat waktu.	Bappeda	Perpanjangan waktu 3 bulan dari target yang di tetapkan
Pekerjaan tidak selesai tepat waktu	RSO 23.36.01.2 8	Membuat <i>timeline</i> dan dievaluasi setiap minggu	Beberapa pekerjaan dikerjakan dalam waktu bersamaan	Melakukan evaluasi penjadwalan waktu pekerjaan	Bappeda	Perpanjangan waktu 3 bulan dari target yang di tetapkan
Tim penyusun tidak kompeten	RSO 23.36.01.2 8	Melakukan evaluasi kompetensi dari tim penyusun	Tidak tersedianya SDM memenuhi kompetensi	Melakukan rekrutmen SDM yang memenuhi kompetensi	Bappeda	Perpanjangan waktu 3 bulan dari target yang di tetapkan
Data dan informasi belum tersedia secara lengkap;	RSO 23.36.01.2 8	Melengkapi data dan informasi secara detail	Tidak tersedianya data pd sektor terkait	Melakukan pengumpulan data primer	Bappeda	Perpanjangan waktu 3 bulan dari target yang di tetapkan
Materi yang diberikan kepada peserta sulit dipahami	RSO 23.36.01.2 8	Pembahasan materi dengan tim penyusun sebelum materi diberikan	Waktu pembahasan materi yang terbatas	Melakukan penjadwalan waktu pembahasan materi	Bappeda	Perpanjangan waktu 3 bulan dari target yang di tetapkan
Tidak memiliki komitmen dalam melaksanakan perencanaan	RSO 23.36.01.2 8	Meningkatkan komitmen dalam melaksanakan perencanaan	Tidak tersedianya SDM memenuhi kompetensi	Melakukan rekrutmen SDM yang memenuhi kompetensi	Bappeda	Perpanjangan waktu 3 bulan dari target yang di tetapkan
Belum optimalnya koordinasi antar OPD Provinsi dan Kab/Kota	RSO 23.36.01.2 8	Meningkatkan koordinasi antar OPD Provinsi dan Kab/Kota	Keterbatasan waktu koordinasi yang minimum	Menyeleksi kegiatan yang masuk prioritas untuk dikoordinasikan terlebih dahulu	Bappeda	Perpanjangan waktu 3 bulan dari target yang di tetapkan

Kegiatan yang diusulkan tidak dibutuhkan/ tidak sesuai dengan Renja OPD/ Renstra OPD	RSO 23.36.01.2 8	Melakukan sinkronisasi kegiatan yang dibutuhkan dan penyesuaian terhadap Renja OPD/Renstra OPD	Keterbatasan waktu koordinasi yang minimum	Melakukan verifikasi berulang kegiatan yang benar-benar dibutuhkan	Bappeda	Perpanjangan waktu 3 bulan dari target yang di tetapkan
Keterlambatan penyusunan data	RSO 23.36.01.2 8	Membuat <i>timeline</i> dan dievaluasi setiap minggu	Tidak tersedianya data tepat waktu	Evaluasi penjadwalan data yang tersedia agar tepat waktu.	Bappeda	Perpanjangan waktu 3 bulan dari target yang di tetapkan
Kurangnya akurasi data kinerja	RSO 23.36.01.2 8	Melakukan validasi data dengan sektor terkait	Tidak tersedianya data pd sektor terkait	Melakukan pengumpulan data primer	Bappeda	Perpanjangan waktu 3 bulan dari target yang di tetapkan
Belum sepenuhnya penyusunan dan penetapan program dan kegiatan	RSO 23.36.01.2 8	Melakukan verifikasi ulang sebelum penyusunan dan penetapan program dan kegiatan	Tidak tersedianya data pd sektor terkait	Melakukan pengumpulan data primer	Bappeda	Perpanjangan waktu 3 bulan dari target yang di tetapkan
Ketidaktepatan pemadu serasian usulan SKPD, hasil musrenbang kecamatan, aspirasi DPRD	RSO 23.36.01.2 8	Melakukan sinkronisasi data usulan SKPD, hasil musrenbang kecamatan, aspirasi DPRD	Tidak tersedianya data pd sektor terkait	Melakukan pengumpulan data primer	Bappeda	Perpanjangan waktu 3 bulan dari target yang di tetapkan
II Risiko Operasional						
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
Tidak sinkronnya data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perangkat daerah rumpun pemerintahan	ROO 23.36.01.2 8	Melakukan Koordinasi dan Pendampingan dengan OPD	Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi serta harmonisasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada rumpun pemerintahan	melaksanakan Monitoring dan evaluasi secara berkala		12 Bulan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						

	Tidak sinkronnya data kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perangkat daerah rumpun pembangunan manusia	ROO 23.36.01.2 8	Melakukan Koordinasi dan Pendampingan dengan OPD	Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi serta harmonisasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada rumpun pembangunan manusia	membuat mekanisme evaluasi program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan tentang rencana aksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan		12 Bulan
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah						
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
	Tidak sinkronnya data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perangkat daerah rumpun infrastruktur	ROO 23.36.01.2 8	Melakukan Koordinasi dan Pendampingan dengan OPD	Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi serta harmonisasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada rumpun infrastruktur	membuat rencana induk utilitas dengan melibatkan stakeholders terkait		12 Bulan
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
	Tidak sinkronnya data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perangkat daerah rumpu kewilayahan	ROO 23.36.01.2 8	Melakukan Koordinasi dan Pendampingan dengan OPD	Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi serta harmonisasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada rumpun kewilayahan	koordinasi dengan OPD dan Konsultan		12 Bulan

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

FORMULIR

Form 8

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Singkawang
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 Urusan Pemerintahan : Penunjang

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Forum Koordinasi Perangkat daerah dan Stakeholder Terkait	Rapat Koordinasi	OPD Terkait	Stakeholder dan Masyarakat	Triwulan I	Triwulan I	Ditindaklanjuti Berupa Notulen
2	Forum Gabungan antar Perangkat Daerah	Rapat Koordinasi	Bappeda	OPD	Triwulan I	Triwulan I	Ditindaklanjuti Berupa Notulen
3	Forum Evaluasi Terhadap Capaian Pembangunan	Rapat Koordinasi	Bappeda	OPD	Triwulan I, II, III, IV	Triwulan I, II, III, IV	Laporan Evaluasi OPD
4	Forum Koordinasi antara Perangkat Daerah Kabupaten Kota dengan Perangkat Daerah Provinsi	Rapat Koordinasi	OPD Terkait	OPD	Triwulan I	Triwulan I	Notulen
5	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Pembangunan PD	Bimtek	Bappeda	OPD	n/a	n/a	Laporan
6	Konsultasi Publik Terkait Program Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah	Rapat Koordinasi	Bappeda	OPD, Stakeholder, Masyarakat	Triwulan I	Triwulan I	Notulen
7	Jadwal Pelaksanaan Tahapan Musrenbang dan Penyusunan RKPD	Surat Edaran	Bappeda	OPD, Stakeholder, Masyarakat	Triwulan I	Januari	Surat
8	melaksanakan Monitoring dan evaluasi secara berkala	Undangan Rapat dan Surat Permintaan Data	OPD, BMUD, Instansi Vertifkal, NGO, Legislatif dan Masyarakat	Bappeda	Triwulan I	Triwulan IV	
9	Membuat mekanisme evaluasi program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan tentang rencana aksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	SK TIM, Surat Tugas, Undangan, Surat Permintaan Data	OPD, BMUD, Instansi Vertifkal, NGO, Legislatif dan Masyarakat	Bappeda	Triwulan I	Triwulan IV	
10	membuat rencana induk utilitas dengan melibatkan stakeholders terkait	Undangan Rapat dan Surat Permintaan Data	OPD, BMUD, Instansi Vertifkal, NGO, Legislatif dan Masyarakat	Bappeda	Triwulan I	Triwulan IV	
11	koordinasi dengan OPD dan Konsultan	SK TIM, Surat Tugas, Undangan, Surat Permintaan Data	OPD, BMUD, Instansi Vertifkal, NGO, Legislatif dan Masyarakat	Bappeda	Triwulan I	Triwulan IV	
12	Melakukan validasi data dengan sektor terkait	Surat Permohonan data	OPD	Bappeda	Triwulan I	Triwulan II	

13	Melakukan sinkronisasi data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perencanaan perangkat daerah bidang	Rapat dan Surat Edaran	OPD	Bappeda	Triwulan I	Triwulan II	
14	Melakukan sosialisasi penggunaan format yang sesuai dan batas waktu yang ditetapkan	Rapat dan Surat Edaran	OPD	Bappeda	Triwulan I	Triwulan II	
15	Membuat <i>timeline</i> dan dievaluasi setiap minggu	Rapat	OPD	Bappeda	Triwulan I	Triwulan II	
16	Melakukan evaluasi kompetensi dari tim penyusun	Rapat	OPD	Bappeda	Triwulan I	Triwulan II	
17	Melengkapi data dan informasi secara detail	Surat Permohonan data	OPD	Bappeda	Triwulan I	Triwulan II	
18	Pembahasan materi dengan tim penyusun sebelum materi diberikan	Rapat	OPD	Bappeda	Triwulan I	Triwulan II	
19	Meningkatkan komitmen dalam melaksanakan perencanaan	Rapat	OPD	Bappeda	Triwulan I	Triwulan II	
20	Meningkatkan koordinasi antar OPD Provinsi dan Kab Kota	Rapat	OPD	Bappeda	Triwulan I	Triwulan II	
21	Melakukan sinkronisasi kegiatan yang dibutuhkan dan penyesuaian terhadap Renja OPD/Renstra OPD	Rapat	OPD	Bappeda	Triwulan I	Triwulan II	
22	Membuat <i>timeline</i> dan dievaluasi setiap minggu	Rapat	OPD	Bappeda	Triwulan I	Triwulan II	
23	Melakukan validasi data dengan sektor terkait	Rapat dan Surat Edaran	OPD	Bappeda	Triwulan I	Triwulan II	
24	Melakukan verifikasi ulang sebelum penyusunan dan penetapan program dan kegiatan	Rapat dan Surat Edaran	OPD	Bappeda	Triwulan I	Triwulan II	
25	Melakukan sinkronisasi data usulan SKPD, hasil musrenbang kecamatan, aspirasi DPRD	Rapat dan Surat Edaran	OPD	Bappeda	Triwulan I	Triwulan II	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

FORMULIR
RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Singkawang
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 Urusan Pemerintahan : Penunjang

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Forum Koordinasi Perangkat daerah dan Stakeholder Terkait	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Bappeda	Triwulan I	Triwulan I	Tidak Dilaksanakan Oleh semua OPD Karena Keterbatasan Pagu Anggaran
2	Forum Gabungan antar Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Bappeda	Triwulan I	Triwulan I	Dilaksanakan
3	Forum Evaluasi Terhadap Capaian Pembangunan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Bappeda	Triwulan I, II, III, IV	Triwulan I, II, III, IV	Dilaksanakan
4	Forum Koordinasi antara Perangkat Daerah Kabupaten Kota dengan Perangkat Daerah Provinsi	Laporan	Kepala Bappeda Provinsi	Triwulan I	Triwulan I	Dilaksanakan
5	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Pembangunan PD	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Bappeda	n/a	n/a	Tidak Dilaksanakan Karena Keterbatasan Pagu Anggaran
6	Konsultasi Publik Terkait Program Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Bappeda	Triwulan I	Triwulan I	Dilaksanakan
7	Jadwal Pelaksanaan Tahapan Musrenbang dan Penyusunan RKPD	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Bappeda	Triwulan I	Januari	Dilaksanakan
8	Melaksanakan Monitoring dan evaluasi secara berkala	Undangan Rapat dan Surat Permintaan Data	Kepala Bidang PPMP	Triwulan I	Triwulan IV	

9	Membuat mekanisme evaluasi program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan tentang rencana aksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	SK TIM, Surat Tugas, Undangan, Surat Permintaan Data	Kepala Bidang PPMPPI	Triwulan I	Triwulan IV	
10	membuat rencana induk utilitas dengan melibatkan stakeholders terkait	SK TIM, Undangan Rapat dan Surat Permintaan Data	Kepala Bidang PPMPPI	Triwulan I	Triwulan IV	
11	koordinasi dengan OPD dan Konsultan	SK TIM, Surat Tugas, Undangan, Surat Permintaan Data	Kepala Bidang PPMPPI	Triwulan I	Triwulan IV	
12	Melakukan validasi data dengan sektor terkait	Surat Permohonan data	Kepala Bappeda	Triwulan I	Februari	
13	Melakukan sinkronisasi data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perencanaan perangkat daerah bidang	Rapat dan Surat Edaran	Kepala Bappeda	Triwulan I	Februari	
14	Melakukan sosialisasi penggunaan format yang sesuai dan batas waktu yang ditetapkan	Rapat dan Surat Edaran	Kepala Bappeda	Triwulan I	Februari	
15	Membuat <i>timeline</i> dan dievaluasi setiap minggu	Rapat	Kepala Bappeda	Triwulan I	Februari	
16	Melakukan evaluasi kompetensi dari tim penyusun	Rapat	Kepala Bappeda	Triwulan I	Februari	
17	Melengkapi data dan informasi secara detail	Surat Permohonan data	Kepala Bappeda	Triwulan I	Februari	
18	Pembahasan materi dengan tim penyusun sebelum materi diberikan	Rapat	Kepala Bappeda	Triwulan I	Februari	
19	Meningkatkan komitmen dalam melaksanakan perencanaan	Rapat	Kepala Bappeda	Triwulan I	Februari	
20	Meningkatkan koordinasi antar OPD Provinsi dan Kabupaten Kota	Rapat	Kepala Bappeda	Triwulan I	Februari	

21	Melakukan sinkronisasi kegiatan yang dibutuhkan dan penyesuain terhadap Renja OPD/Renstra OPD	Rapat	Kepala Bappeda	Triwulan I	Februari	
22	Membuat <i>timeline</i> dan dievaluasi setiap minggu	Rapat	Kepala Bappeda	Triwulan I	Februari	
23	Melakukan validasi data dengan sektor terkait	Rapat dan Surat Edaran	Kepala Bappeda	Triwulan I	Februari	
24	Melakukan verifikasi ulang sebelum penyusunan dan penetapan program dan kegiatan	Rapat dan Surat Edaran	Kepala Bappeda	Triwulan I	Februari	
25	Melakukan sinkronisasi data usulan SKPD, hasil musrenbang kecamatan, aspirasi DPRD	Rapat dan Surat Edaran	Kepala Bappeda	Triwulan I	Februari	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

FORMULIR
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

FORM 10

Nama Pemda : Pemerintah Kota Singkawang
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 Urusan Pemerintahan : Penunjang

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis									
	Forum Koordinasi Perangkat daerah dan Stakeholder Terkait		Terjadi	Keterbatasan Pagu Anggaran	Stakeholder dan Masyarakat Tidak Mengetahui Prioritas Pembangunan Tahun Berjalan	n/a	Belum ada solusi karena kondisi keuangan daerah yang belum memadai	n/a	n/a	
	Forum Gabungan antar Perangkat Daerah		Tidak Terjadi							
	Forum Evaluasi Terhadap Capaian Pembangunan		Tidak Terjadi							
	Forum Koordinasi antara Perangkat Daerah Kabupaten Kota dengan Perangkat Daerah Provinsi		Tidak Terjadi							
	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Pembangunan PD		Terjadi	Keterbatasan Pagu Anggaran	Masih ada Data dari OPD yang belum tepat sehingga memperpanjang waktu dari tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan	n/a	Belum ada solusi karena kondisi keuangan daerah yang belum memadai	n/a	n/a	
	Konsultasi Publik Terkait Program Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah		Tidak Terjadi							
	Jadwal Pelaksanaan Tahapan Musrenbang dan Penyusunan RKPD		Tidak Terjadi							
	Masalah Resiko baru		Belum Dievaluasi							
	Tidak sinkronnya data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perangkat daerah rumpun pemerintahan			Data Primer dari OPD belum terkumpul	Pelaporan pencapaian indikator pembangunan terlambat.			melaksanakan Monitoring dan evaluasi secara berkala		
	Tidak sinkronnya data kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perangkat daerah rumpun pembangunan manusia			Data yang dikumpulkan dari OPD dan Instansi terkait ada perbedaan	Kebijakan Kurang Konsisten dalam pengambilan keputusan terkait penanggulangan kemiskinan			membuat mekanisme evaluasi program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan tentang rencana aksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan		

	Tidak sinkronnya data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perangkat daerah rumpun infrastruktur			Data dari OPD kurang Valid	sulit dapatnya data informasi mengenai jaringan utilitas		membuat rencana induk utilitas dengan melibatkan stakeholders terkait		
	Tidak sinkronnya data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perangkat daerah rumpu kewilayahan			Data dari instansi terkait dan OPD kurang Valid	Rencana aksi kurang implementatif, dan Rencana aksi belum mencapai kebutuhan		koordinasi dengan OPD dan Konsultan		
	Sumber data tidak valid		Tidak Terjadi						
	Tidak sinkron data target kinerja dan anggaran yang disusun dalam dokumen perencanaan perangkat daerah bidang		Tidak Terjadi						
	Data yang disampaikan tidak sesuai format pengisian/kertas kerja serta penyampian tidak tepat waktu		Tidak Terjadi						
	Pekerjaan tidak selesai tepat waktu		Tidak Terjadi						
	Tim penyusun tidak kompeten		Tidak Terjadi						
	Data dan informasi belum tersedia secara lengkap		Tidak Terjadi						
	Materi yang diberikan kepada peserta sulit dipahami		Tidak Terjadi						
	Tidak memiliki komitmen dalam melaksanakan perencanaan		Tidak Terjadi						
	Belum optimalnya koordinasi antar OPD Provinsi dan Kab/Kota		Tidak Terjadi						
	Kegiatan yang diusulkan tidak dibutuhkan/ tidak sesuai dengan Renja OPD/ Renstra OPD		Tidak Terjadi						
	Keterlambatan penyusunan data		Tidak Terjadi						
	Kurangnya akurasi data kinerja		Tidak Terjadi						
	Belum sempurnanya penyusunan dan penetapan program dan kegiatan		Tidak Terjadi						
	Ketidaktepatan pemadu serasian usulan SKPD, hasil musrenbang kecamatan, aspirasi DPRD		Tidak Terjadi						
	II Risiko Operasional								

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan